

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Laporan keuangan yang diterbitkan oleh instansi pemerintah memiliki fungsi tersendiri bagi penggunanya. Laporan keuangan instansi pemerintah bukan hanya digunakan oleh pihak internal instansi pemerintah. Tetapi, laporan keuangan instansi pemerintah juga dibutuhkan oleh pihak eksternal misalnya, investor yang membutuhkan tolak ukur kinerja instansi, pemberian kredit bagi kreditor, dan sebagai perhitungan pajak bagi pemerintah. Dilihat dari peran pentingnya laporan keuangan, tentunya setiap instansi pemerintah dalam menyajikan laporan keuangan menginginkan laporan keuangan yang berkualitas, sesuai dengan kepentingan masing-masing. Misalnya, untuk menarik investor instansi menyajikan laba dalam laporan keuangan lebih dari pada seharusnya, sebaliknya instansi mengurangi laba dalam penyajian laporan keuangan untuk menghindari besarnya pelayanan pajak (Wijaya, 2014).

Penyusunan laporan keuangan dimaksudkan untuk mengarah pada tujuan tertentu. Tujuan laporan keuangan secara umum adalah memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, dan arus kas instansi yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi. Di samping itu juga untuk menunjukkan pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya-sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Dengan adanya laporan keuangan baik keuangan pusat maupun daerah diharapkan dapat dikelola dengan baik dalam rangka mengelola dana publik secara

transparan, ekonomis, efisien, efektif dan akuntabel. Adanya laporan keuangan tersebut perlu dipertimbangkan lebih lanjut kegunaan laporan sebagai suatu kewajiban belaka tanpa menjadikan keuangan itu sebagai sumber informasi untuk menentukan dan mengambil kebijakan dalam mengembangkan dan menumbuhkan wilayahnya (Sukmadiansyah, 2015).

Perkembangan teknologi informasi, terutama pada era informasi berdampak signifikan terhadap sistem informasi akuntansi (SIA) dalam suatu instansi. Kebutuhan sistem ini ditandai dengan penggunaan komputer didalam hal sistem informasi, dampak yang dirasakan secara nyata adalah pemrosesan data yang mengalami perubahan dari sistem manual ke system komputer. Perkembangan sebuah sistem informasi juga perlu didukung oleh banyak faktor yang diharapkan bisa memberikan keberhasilan dari sistem tersebut. Keberhasilan aplikasi system informasi pada suatu instansi dipengaruhi dari cara sistem itu dijalankan, tingkat kemudahan sistem itu bagi para pemakainya, dan pemanfaatan teknologi yang digunakan. Setiap instansi dituntut untuk melakukan perubahan di bidang teknologi sehingga nantinya mampu memberikan peluang untuk meningkatkan keunggulan kompetitif (Almumtahanah, 2019).

Perkembangan teknologi dari pengaruh globalisasi sekarang ini begitu pesat yang diikuti dengan perkembangan sistem informasi yang berbasis teknologi telah menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan yang begitu cepat dalam berbagai bidang termasuk dalam bidang bisnis. Perkembangan teknologi informasi mempunyai dampak yang sangat signifikan terhadap sistem informasi akuntansi dalam suatu organisasi bisnis, khususnya dalam pemrosesan data yang mengalami

perubahan dari sistem manual digantikan dengan system komputer sebagai alat pemrosesan data. Penggunaan teknologi informasi di era sekarang ini merupakan elemen penting dalam aktivitas instansi. Sistem informasi membawa pengaruh besar terhadap hampir semua aspek dalam pengelolaan bisnis, termasuk dalam pengelolaan keuangan (Astuti, 2019).

Fenomena yang berkaitan dengan Laporan Keuangan Pemerintah daerah Jawa Barat (Jabar) Tahun Anggaran 2020. Wakil Ketua BPK Agus Joko Pramono saat menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah daerah Jabar Tahun 2020 pada akhir Mei menyebutkan, ada sedikitnya empat permasalahan signifikan yang mesti segera ditindaklanjuti.

Pertama, mengenai pemberian tunjangan kompensasi dukungan mobilitas jabatan struktural yang tidak sesuai ketentuan yang berlaku. Permasalahan kedua, adanya kesalahan penganggaran belanja barang dan belanja modal pada 25 Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Ketiga, pengelolaan belanja hibah tidak sesuai ketentuan, antara lain belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibahnya. Sedangkan yang terakhir mengenai kekurangan volume pekerjaan paket infrastruktur pada 4 OPD. Wakil Ketua BPK juga mengingatkan bahwa berdasarkan Pasal 20 UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi laporan hasil pemeriksaan.

“Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi laporan hasil pemeriksaan. Jawaban atau penjelasan

dimaksud disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima,” tegasnya. (Permasalahan Signifikan di LK Pemprov Jabar Ini Harus Segera Ditindaklanjuti’

WARTA DIGITAL ([bpk.go.id](http://bpk.go.id))

**Tabel 1.1**

Daftar Opini Audit BPK atas LKPD Kota Bandung  
Tahun 2016-2020

Tahun	Opini BPK
2016	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
2017	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
2018	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2019	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2020	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Sumber : [jabar.bpk.go.id](http://jabar.bpk.go.id)

**Tabel 1.2**

Daftar Opini Audit BPK atas LKPD Kab Bandung  
Tahun 2016-2020

Tahun	Opini BPK
2016	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2017	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2018	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2019	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2020	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

**Tabel 1.3**

Daftar Opini Audit BPK atas LKPD Kota Cimahi  
Tahun 2016-2020

Tahun	Opini BPK
2016	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2017	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2018	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2019	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2020	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Tabel 1.1 di atas menunjukkan bahwa Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) memberikan opini terhadap Kabupaten Bandung pada tahun 2016 dengan opini Wajar dengan Pengecualian (WDP) 11%, Pada Tahun 2017 mengalami kejadian yang sama dengan Opini Wajar dengan Pengecualian (WDP) 11%, Pada Tahun 2018 mengalami perbaikan dengan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) 89%, pada Tahun 2019 keadaan stabil mendapatkan Opini Wajar tanpa pengecualian (WTP) 100%, Pada tahun 2020 mengalami penurunan WTP menjadi 93%.

Tabel 1.2 di atas menunjukkan bahwa Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) memberikan opini terhadap Kota Bandung pada tahun 2016 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 89% , Pada Tahun 2017 mengalami kejadian yang sama dengan Opini Wajar tanpa Pengecualian (WTP) 89%, Pada Tahun 2018 mengalami keadaan stabil dengan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) 89%, pada Tahun 2019 keadaan stabil mendapatkan Opini Wajar tanpa pengecualian (WTP) 100%. Pada tahun 2020 mengalami penurunan WTP menjadi 93%.

Tabel 1.3 di atas menunjukkan bahwa Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) memberikan opini terhadap Kota Bandung pada tahun 2016 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 89%, Pada Tahun 2017 mengalami kejadian yang sama dengan Opini Wajar tanpa Pengecualian (WTP) 89%, Pada Tahun 2018 mengalami keadaan stabil dengan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) 89%, pada Tahun 2019 keadaan stabil mendapatkan Opini Wajar tanpa pengecualian (WTP) 100%. Pada tahun 2020 mengalami penurunan WTP menjadi 93%.

Kualitas laporan keuangan dapat dipengaruhi oleh beberapa factor, di antaranya yaitu system informasi akuntansi Keuangan Daerah, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dan Peran Auditor Internal.

Faktor pertama yaitu sistem informasi akuntansi Keuangan Daerah berperan penting bagi instansi pemerintah dalam hal efektivitas perencanaan, pengendalian, analisa, pengambilan keputusan, dan penyajian laporan keuangan sehingga dapat dikatakan bahwa system informasi akuntansi sangat bermanfaat untuk efektivitas kinerja keuangan serta kinerja manajemen yang pada akhirnya akan menunjukkan kinerja instansi secara keseluruhan. Oleh karena itu system informasi akuntansi keuangan daerah harus dirancang sesuai dengan kepentingan atau kebutuhan instansi sehingga dapat menghasilkan informasi yang berkualitas dan akurat serta dapat dipertanggung jawabkan. Sistem informasi yang baik tidak hanya digunakan untuk menyimpan data secara elektronik tetapi juga harus mampu mendukung proses analisis yang dilakukan oleh manajemen (Almumtahanah, 2019).

Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah (SIKAD) dimana untuk menghasilkan kualitas laporan keuangan yang baik dibutuhkan sebuah sistem atau

prosedur yang baik dalam mendokumentasikan semua transaksi akuntansi untuk diolah menjadi sebuah laporan keuangan yang akan disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, 5 pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah.

Hal tersebut didukung oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri No.59 Tahun 2007 yang menjelaskan bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) adalah serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi computer.

Menurut Peraturan pemerintah RI No. 65 Tahun 2010, sistem informasi keuangan daerah merupakan “Suatu sistem yang digunakan untuk mengolah data dan bukti transaksi pemerintahan, mengelola, dan menyediakan informasi keuangan terhadap para pengguna laporan keuangan. Sistem akuntansi merupakan faktor utama pendorong agar manajemen perusahaan dapat menghasilkan informasi yang terstruktur dan mengandung arti. Maka untuk menentukan kapan suatu transaksi dicatat, digunakan system berbagai basis/dasar akuntansi system pencatatan, antara lain: (1) basis kas (Cash Basis); (2) Basis Akrua (Accrual basis); (3) Basis kas modifikasi; (4) Basis Akrua Modifikasi.

Berikut ini penulis sampaikan fenomena yang berkaitan dengan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah yaitu SIKD mendapat perhatian besar dari berbagai pihak, terutama dalam proses pencatatan yaitu kurang baiknya laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) dilihat dari hasil pemeriksaan, bisa menjadi

indikasi kurang kredibelnya pengelolaan keuangan daerah untuk tahun 2020 dalam hal ini dapat dilihat sebagai tindakan penyusunan LKPD yang belum melalui Prosedur Akuntansi dalam menyusun laporan keuangan, dan kurangnya keterbukaan akuntabilitas atau pertanggungjawaban. Ada temuan-temuan yang berulang, yang setiap tahun hampir selalu ada, jadi kami juga menekankan pada Pemda Prov agar hal itu ditekan, diminimalkan, termasuk dampak-dampaknya. Ada pula temuan baru. Itu kami minta kepada Pemprov untuk bisa dilakukan langkah-langkah perbaikan,” papar Arif.

“Tindak lanjutnya juga kalau kami nilai masih di bawah 70 persen, masih perlu ditingkatkan lagi. Target kami sih minimal 85 persen bisa tercapai,” tuturnya.

Beberapa permasalahan signifikan yang menjadi catatan BPK untuk Pemprov Jabar antara lain pengelolaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang belum memadai, kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan tambahan penghasilan kepada ASN nonaktif, kekurangan volume pekerjaan belanja modal jalan, irigasi dan jaringan, keterlambatan enam pekerjaan belanja modal, serta penatausahaan aset yang belum memadai.

(Sumber: <https://www.sinarjabar.com>).

Faktor kedua yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yaitu Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) yang merupakan suatu sistem usaha atau sistem sosial yang dilakukan instansi yang terdiri dari struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran untuk menjaga dan mengarahkan jalan instansi agar bergerak sesuai dengan tujuan dan program instansi dan mendorong efisiensi serta dipatuhinya kebijakan manajemen. Sistem pengendalian



internal yang baik sangat bermanfaat bagi manajemen, karena dapat menyediakan data yang andal serta digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Pengendalian internal yang memadai diperlukan untuk mengkoordinasi dan mengawasi jalannya aktivitas instansi. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian instansi seperti penyelewengan, kecurangan, pemborosan, dan pencurian baik dari pihak internal maupun pihak eksternal instansi dalam menilai instansi serta untuk mengevaluasi dan mengambil tindakan perbaikan dalam mengantisipasi kelemahan instansi (Astuti, 2019).

Pengendalian internal terdiri dari kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh instansi-instansi pemerintah membantu manajemen mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengendalian internal yang baik akan membantu manajemen mengawasi jalannya kegiatan usaha instansi, menyediakan informasi yang dibutuhkan manajemen, serta mengurangi kemungkinan terjadinya berbagai tindakan penyalahgunaan dan penyelewengan yang akan menghambat usaha untuk mencapai tujuan instansi. Agar pengendalian internal berjalan secara efektif, diperlukan adanya bagian audit internal yang independen dengan fungsi pertanggungjawaban atas fungsi-fungsi otorisasi, pencatatan, dan penyimpanan dalam semua bidang didalam instansi. Salah satu pengendalian intern yang penting untuk dilaksanakan dalam instansi adalah pengendalian persediaan barang jadi, karena persediaan barang jadi berhubungan dengan lancarnya penjualan. Untuk menciptakan suatu pengendalian internal yang memadai terhadap bidang ini maka diperlukan auditor internal untuk mendukung pengendalian tersebut. Pada instansi

tempat penulis melakukan penelitian sudah dilakukan pengendalian internal khususnya pengendalian persediaan barang jadi (Garnis, 2019).

Berikut ini penulis sampaikan Fenomena yang berkaitan dengan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah yaitu Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK), Isma Yatun, menyerahkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2021 kepada Ketua DPR pada hari ini (24/5) di Gedung DPR, Jakarta. IHPS II Tahun 2021 merupakan ringkasan dari 535 laporan hasil pemeriksaan (LHP), terdiri atas 3 LHP Keuangan, 317 LHP Kinerja, dan 215 LHP Dengan Tujuan Tertentu. IHPS II Tahun 2021 ini juga menyajikan hasil pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan, penyelesaian ganti kerugian negara/daerah, dan pemanfaatan hasil pemeriksaan investigatif, penghitungan kerugian negara, dan pemberian keterangan ahli.

BPK mengungkap 4.555 temuan yang memuat 6.011 permasalahan sebesar Rp31,34 triliun dalam pemeriksaan BPK di semester II tahun 2021. Permasalahan yang diungkapkan terdiri dari 3.173 permasalahan berkaitan dengan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan (3E) sebesar Rp1,64 triliun; 1.720 permasalahan merupakan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp29,70 triliun; dan 1.118 permasalahan terkait kelemahan sistem pengendalian intern (SPI). Dalam permasalahan 3E, 95,9% atau 3.043 permasalahan merupakan ketidakefektifan sebesar Rp218,56 miliar, 127 permasalahan ketidakhematan sebesar Rp1,42 triliun, dan 3 permasalahan ketidakefisienan sebesar Rp1,59 miliar. ([sumber: bpk-ungkap-6011-permasalahan-sebesar-rp3134-triliun-dalam-ihps-ii-tahun-2021](#)).

Faktor ketiga yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yaitu peran auditor internal yang merupakan sebuah aktivitas konsultasi dan memastikan tercapainya tujuan yang dirancang untuk menambah dan meningkatkan operasi organisasi. Audit internal membantu organisasi memenuhi tujuannya melalui pelaksanaan evaluasi dengan pendekatan disiplin dan sistematis untuk meningkatkan efektifitas manajemen, pengendalian, dan proses tata kelola resiko (The IIA's Board of Directors, 2003). Fungsi audit internal dalam digunakan sebagai sumber informasi yang independen mengenai berbagai aktivitas organisasi agar dapat membantu pengambilan keputusan yang obyektif dan accountable. Audit bertugas untuk mengawasi proses penyusunan laporan keuangan. Inti tugas audit adalah membantu komisararis dalam rangka peningkatan kualitas laporan keuangan dan peningkatan efektifitas audit dan eksternal audit. Kemudian komite audit pun bertugas mengurangi intervensi direksi terhadap angka akuntansi sampai tingkat minimal sehingga laporan keuangan dapat lebih diandalkan bagi pemegang saham dalam mengambil keputusan (Muheni, 2020).

Berikut ini penulis sampaikan Fenomena yang berkaitan dengan peran auditor internal yaitu Dalam laporan pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) Triwulan VIII tahun 2020 disebutkan bahwa kinerja dan independensi APIP masih dipertanyakan. Upaya penguatan peran dan fungsi APIP masih terus dihantui tantangan sistemik berupa kualitas dan kuantitas SDM, kelembagaan dan kewenangan serta anggaran, walau beberapa kerangka regulasi telah coba mengatasi masalah tersebut. Jumlah SDM APIP saat ini diakui belum memadai. Analisis kebutuhan yang dilakukan oleh tiga institusi pembina APIP

memperlihatkan masih ada kesenjangan yang cukup lebar. Jumlah auditor dalam APIP adalah sebanyak 13.420 orang, sementara kebutuhannya mencapai 46.560 orang. Jumlah auditor kepegawaian (audiwan) saat ini 123 orang, sementara jumlah kebutuhannya mencapai 264 orang. Kemudian jumlah Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) saat ini adalah 2.701 orang sementara jumlah angka yang dibutuhkan masih dalam perhitungan.

Anggaran yang dialokasikan untuk inspektorat juga belum memadai sehingga pelaksanaan fungsi pengawasan di pemerintah daerah tidak maksimal. Selain dari sisi komitmen alokasi anggaran, secara legal belum ada dasar hukum bagi pemda untuk mengalokasikan anggaran APBD dalam jumlah tertentu untuk pelaksanaan fungsi pengawasan inspektorat daerah. Pengawasan yang dilakukan APIP (terutama di daerah) dinilai masih kurang efektif karena independensi, kompetensi dan integritasnya dinilai kurang memadai. Kurangnya independensi itu dilihat dari posisi SDM APIP yang secara struktural lemah karena berada di bawah kendali kepala daerah dan sekretarisnya. Dalam keadaan demikian tidak mungkin SDM APIP melakukan pengawasan secara profesional dan obyektif.

(Sumber: <https://www.antarane.ws.com/berita/2179058/memaksimalkan-apip-untuk-memulihkan-ekonomi-dan-memberantas-korupsi>)

Penelitian yang dilakukan oleh Ruswanto Ngguna, Muliati dan Fadli Moh. Saleh 2017 menyatakan bahwa Kompetensi Aparatur, Pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan dan Peran Auditor Internal berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah,

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Widari dan Sutrisno 2017 menyatakan Sistem Pengendalian Internal dan Komitmen Organisasi berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Ida Ayu Enny Kiranayanti dan Ni Made Adi Erawati 2016 menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, dan pemahaman berbasis akrual mempunyai pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

Alasan peneliti memilih Pemda Kabupaten bandung, Kota Bandung, Kota Cimahi sebagai tempat penelitian adalah peneliti ingin mengetahui apakah pemda Kabupaten bandung, Kota Bandung, Kota Cimahi telah memenuhi indikator dari system informasi akuntansi keuangan daerah, sistem pengendalian intern pemerintah, dan peran auditor internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka penulis merasa termotivasi dan tertarik untuk melakukan penelitian yang hasilnya akan dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul **“PENGARUH SISTEM INFORMASI AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH, SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH, DAN PERAN AUDITOR INTERNAL TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Survey pada Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung, Kota Bandung, Kota Cimahi)”**.

## **1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah**

### **1.2.1. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan di atas, maka penulis dapat mengidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut.

1. Masih adanya kepala daerah yang melakukan kecurangan dengan menyuap auditor untuk mendapatkan perolehan opini audit terbaik.
2. Pemanfaatan system informasi keuangan daerah (SIKD) yang kurang maksimal yang digunakan menyusun laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah disebabkan karena belum semua SKPD menggunakan aplikasi system informasi keuangan daerah.
3. Kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang terdiri atas tiga kelompok temuan yaitu kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, serta kelemahan struktur pengendalian intern.
4. Masih adanya permasalahan yang berkaitan dengan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan dalam system pengendalian internal.
5. Masih buruknya pelayanan publik dan tingginya tingkat korupsi di tanah air tak lepas dari lemahnya sistem pengawasan internal dan auditor internal masih pasif dalam melaksanakan pengawasan.
6. Masih adanya Pengawasan yang dilakukan APIP (terutama di daerah) dinilai masih kurang efektif karena independensi, kompetensi dan integritasnya dinilai kurang memadai.

### **1.2.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka penulis mengidentifikasi masalah dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah di Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung, Kota Bandung, dan Kota Cimahi.
2. Bagaimana Sistem Pengendalian internal Pemerintah (SPIP) di Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung, Kota Bandung, dan Kota Cimahi.
3. Bagaimana Peran Auditor Internal di Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung, Kota Bandung, dan Kota Cimahi.
4. Bagaimana Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung, Kota Bandung, dan Kota Cimahi.
5. Seberapa besar pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Laporan Kualitas Keuangan Pemerintah Daerah di Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung, Kota Bandung, dan Kota Cimahi.
6. Seberapa besar Sistem Pengendalian internal Pemerintah (SPIP) terhadap Laporan Kualitas Keuangan Pemerintah Daerah di Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung, Kota Bandung, dan Kota Cimahi.
7. Seberapa besar Peran Auditor Internal terhadap Laporan Kualitas Keuangan Pemerintah Daerah di Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung, Kota Bandung, dan Kota Cimahi.

8. Sebrapa besar pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah, Sistem Pengendalian internal Pemerintah (SPIP), Peran Auditor Internal secara simultan terhadap Laporan Kualitas Keuangan Pemerintah Dearah di Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung, Kota Bandung, dan Kota Cimahi.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan oleh peneliti di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten bandung, Kota Bandung, dan Kota Cimahi.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Sistem Pengendalian internal Pemerintah (SPIP) pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung, Kota Bandung, dan Kota Cimahi.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis Peran Auditor Internal pada Pemeirntah Daerah Kabupaten Bandung, Kota Bandungi, dan Kota Cimahi.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Pemeirntah Daerah Kabupaten Bandung, Kota Bandung, dan Kota Cimahi.
5. Untuk mengetahui dan menganalisis besarnya pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Laporan Kualitas



Keuangan Pemerintah Dearah pada Pemeirntah Daerah Kabupaten Bandung, Kota Bandung, dan Kota Cimahi.

6. Untuk mengetahui dan menganalisis besarnya pengaruh Sistem Pengendalian internal Pemerintah (SPIP) terhadap Laporan Kualitas Keuangan Pemerintah Dearah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung, Kota Bandung, dan Kota Cimahi.
7. Untuk mengetahui dan menganalisis besarnya pengaruh Peran Auditor Internal terhadap Laporan Kualitas Keuangan Pemerintah Dearah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung, Kota Bandung, dan Kota Bandung.
8. Untuk mengetahui dan menganalisis besarnya pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah, Sistem Pengendalian internal Pemerintah (SPIP), Peran Auditor Internal secara simultan terhadap Laporan Kualitas Keuangan Pemerintah Dearah pada Pemeirntah Daerah Kabupaten Bandung, Kota Bandung, dan Kota Cimahi.

#### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang dapat dipercaya dan memberikan manfaat yang berguna bagi semua pihak yang berkepentingan.

#### **1.4.1. Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi tentang bahan informasi yang digunakan dalam hal kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung, Kota Bandung, Kota Cimahi melalui Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah (SIAKD), Sistem Pengendalian internal Pemerintah (SPIP) dan Peran Auditor Internal sehingga tujuan pemerintahan dapat tercapai.

#### **1.4.2. Kegunaan Praktis**

Penelitian ini diharapkan oleh penulis bermanfaat dan berguna bagi berbagai pihak, diantaranya :

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis dalam sistem informasi akuntansi, khususnya mengenai pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah (SIAKD), Sistem Pengendalian internal Pemerintah (SPIP) dan Peran Auditor Internal serta meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan.

2. Bagi Instansi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi pemerintah daerah mengenai masalah Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah, Sistem Pengendalian internal Pemerintah (SPIP) dan Peran Auditor Internal serta meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Daerah.

### 3. Bagi Intansi Pendidikan

Masyarakat akademik pada umumnya dan mahasiswa pada khususnya sebagai bahan referensi bagi yang melakukan penelitian lebih lanjut berkenaan dengan masalah ini.

## **1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis akan melakukan penelitian di Pemerintah Kabupaten Bandung, Kota Bandung dan Kota Cimahi. Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data yang diperlukan sesuai dengan objek yang akan diteliti pada waktu yang telah ditentukan sampai dengan selesai untuk menentukan data-data tertulis dan informasi lainnya sebagai bahan penyusunan skripsi.